

ABSTRAK

Pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden merupakan hak prerogatif yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, belum adanya pengaturan yang secara tegas mengenai pembatasan pemberian amnesti dan abolisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan serta melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan pembatasan hak prerogatif Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana korupsi serta implikasi hukumnya dalam perspektif negara hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan pembatasan yang jelas terhadap pemberian amnesti dan abolisi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka ruang kompromi politik dalam pengambilan keputusan, serta berpotensi bertentangan dengan prinsip independensi peradilan dan supremasi hukum. Selain itu, pemberian amnesti dan abolisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi tanpa kriteria yang jelas dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat dan melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas dan terukur agar penggunaan hak prerogatif Presiden tetap berada dalam koridor prinsip negara hukum serta mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata kunci: hak prerogatif presiden, amnesti dan abolisi, tindak pidana korupsi, negara hukum, *checks and balances*.

ABSTRACT

The granting of amnesty and abolition by the President is a prerogative right regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, the absence of explicit regulations limiting the granting of amnesty and abolition to perpetrators of corruption crimes has the potential to lead to abuse of authority and weaken efforts to eradicate corruption, which is categorized as an extraordinary crime. This study aims to analyze the urgency of regulating restrictions on the President's prerogative in granting amnesty and abolition for corruption crimes and their legal implications from the perspective of the rule of law.

The research method used is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach, using primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that the absence of clear restrictions on the granting of amnesty and abolition has the potential to create legal uncertainty, open up room for political compromise in decision-making, and potentially conflict with the principles of judicial independence and the rule of law. In addition, granting amnesty and abolition to perpetrators of corruption without clear criteria can create perceptions of injustice in society and weaken the effectiveness of corruption eradication. Therefore, more explicit and measurable regulations are needed so that the use of the President's prerogative remains within the corridor of the rule of law and the checks and balances mechanism in the Indonesian constitutional system.

Keywords: *presidential prerogative, amnesty and abolition, corruption, rule of law, checks and balances.*